

**EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS**

Oleh :

Siti Sundari¹, Lina Marliani²

sitsun991@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln.R.E. Martadinata No.150 Ciamis

ABSTRAK

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa dimensi yang belum dilaksanakan diantaranya terlihat dari kurangnya partisipasi sebagai pihak untuk dapat aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh, kurangnya pengawasan dalam program Kota Tanpa Kumuh oleh instansi dan pihak yang seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal. Diantaranya dalam mengukur skala prioritas tidak dilaksanakan secara sistematis dari apa yang direncanakan sebelumnya, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi dan pihak terkait. Adapun yang menjadi hambatan dalam penelitian ini diantaranya kurangnya partisipasi sebagai pihak untuk dapat aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh, kurangnya pengawasan dalam program Kota Tanpa Kumuh oleh instansi dan pihak yang seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis diantaranya dengan mengevaluasi kembali sampai sejauh mana 7 indikator kumuh tersebut dilaksanakan dan dengan adanya sinergitas antara instansi terkait dalam melakukan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi yang baik.

Kata Kunci :Evaluasi, Program Kota Tanpa Kumuh, Pemukiman Kumuh

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penanganan kawasan kumuh adalah melalui kegiatan peningkatan maupun pembangunan prasarana – sarana baru, baik dari segi perumahan maupun kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk

yang cukup pesat mempunyai dampak terhadap berbagai bidang antara lain di bidang fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi yang memerlukan ketersediaan prasarana dan sarana dasar yang secara umum akan bersifat susul menyusul dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurang tersedianya sarana dasar ini akan mengakibatkan tumbuhnya beberapa

bagian wilayah perkotaan menjadi kawasan kumuh. Kawasan yang kumuh sering diidentikkan dengan kawasan yang jorok dengan masalah atau kemiskinan kota. Kawasan kumuh merupakan lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas secara fisik, ekonomi dan budaya dan lokasinya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta merupakan permukiman liar dan menghuni suatu lahan yang bukan miliknya/haknya atau tanpa ijin dari pemiliknya. Namun demikian pemenuhan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Dalam rangka mendorong segera tercapainya kesejahteraan rakyat di bidang papan, pemerintah berupaya melakukan akselerasi pemenuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui agenda pembangunan “Indonesia Bebas Kumuh 2020”. Suatu hal yang patut kita dukung, mengingat semakin meluasnya kawasan lingkungan kumuh sampai saat ini dan semakin bertambahnya selisih angka kebutuhan akan papan dan kemampuan pemenuhannya. Di satu sisi, kita berharap hal ini akan bisa tercapai, tetapi di sisi yang lain kita juga mengkhawatirkan akan resiko tidak tercapainya target tersebut.

Begitu pula di Kabupaten Ciamis ini permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya sangat kompleks, diperlukann kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan berkelanjutan. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yakni kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh, bahwa kriteria permukiman kumuh ditinjau dari bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Pentingnya evaluasi dalam Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Ciamis ini, agar dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program KOTAKU dalam upaya mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Ciamis. Perlu adanya evaluasi dalam pelaksanaan program KOTAKU secara terencana dan berkesinambungan. Dengan demikian pelaksanaan program di tahun berikutnya dapat berjalan dengan efektif.

Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU

dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah saerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup :

- (1) pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota, karena peran pemda menjadi sangat penting dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota;
- (2) penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dalam pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll);
- (3) perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh;
- (4) penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan – pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program KOTAKU yang telah berjalan selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sudah mengurangi kawasan kumuh yang semula sebesar 82,723 ha menjadi tersisa 18,49 ha. Namun dalam perjalanannya perlu ada analisis dalam beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Adanya perubahan usulan kegiatan yang terdapat di dalam Dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Masih kurangnya kapasitas teknis dari KSM dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi yang mengakibatkan kualitas bangunan konstruksi yang terbangun masih belum memadai.
3. Sinergitas penanganan kawasan kumuh yang bersumber dari APBN, APBD, dan peran pihak swasta belum berjalan secara optimal.

Sehingga program ini diperlukan penanganan permasalahan permukiman kumuh untuk menyelesaikan permukiman kumuh. Dalam hal ini yang menjadi nahkodanya adalah Pemerintah Daerah. Dengan demikian evaluasi sangatlah penting untuk dilakukan agar pelaksanaan program KOTAKU ini ke depan dapat berjalan lebih optimal lagi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten

Ciamis dalam mengatasi hambatan – hambatan evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang permasalahan yang ada dengan tujuan utama, yaitu :

1. Untuk mengetahui evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.

B. LANDASAN TEORITIS

a. Pengertian Manajemen Pembangunan.

1. Pengertian Manajemen

Ada beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan manajemen seperti halnya menurut Follet yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Selanjutnya menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti (2008: 1) mendefinisikan Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses mengatur ataupun mengelola untuk mencapai tujuan. Manajemen disini dapat pula diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam sebuah pencapaian tujuan dari mulai perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Pembangunan

Perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan dan suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda (Yunus, 1978) dalam Widyastuti (2002). Pembangunan wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan merupakan pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab jika ditinjau dari segi pemerintahan.

Menurut SK Mendagri No. 65 tahun 1995. Manajemen perkotaan adalah pengelolaan sumber daya perkotaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tata ruang, lahan, ekonomi, keuangan, lingkungan hidup, pelayanan jasa, investasi, prasarana dan sarana perkotaan; serta disebutkan pula bahwa pengelola perkotaan adalah para pejabat (Pemerintah) pengelola perkotaan. Dengan demikian, menurut apa yang secara formal didefinisikan oleh Pemerintah, manajemen perkotaan meliputi hal yang cukup luas, dan nampak menekankan pada aspek perkembangan kota dan perkembangan ekonomi kota.

b. Pengertian Evaluasi

Evaluasi menurut Nawawi (2003:52) menyatakan bahwa Pelaksanaan atau penggerakan dilakukan organisasi setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk.

Selanjutnya menurut Menurut William H (Soewarno, 1980 : 21) menyatakan bahwa Pengawasan (Controlling) dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana. Sedangkan Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjaminagar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut William N Dunn (dalam Riant, Nugroho, 2009:536), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, (William N Dunn 2000:609), diantaranya :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode – metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut William N Dunn (2000:610) mengemukakan terdapat 6 (enam) tipe kriteria evaluasi yang menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas : Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.
2. Efisiensi : Efisiensi merupakan suatu pencapaian tujuan dengan mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil.
3. Kecukupan : Kecukupan merupakan keberhasilan pencapaian tujuan yang meliputi kepuasan kebutuhan dan nilai yang telah ditetapkan atau direncanakan.
4. Perataan : Perataan dapat dikatakan sebagai suatu keadilan yang diterima oleh semua sasaran kebijakan.
5. Responsivitas : Responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya

diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan : Ketepatan dapat dikatakan sebagai kelayakan dari tiap – tiap tahapan pelaksanaan kebijakan yang seharusnya dihubungkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Program Kota Tanpa Kumuh

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh perlu diakukan sosialisasi terhadap masyarakat di kawasan kumuh guna memberikan penjelasan mengenai manfaat dari program tersebut.

Menurut MacBride (Effendy, 2003:27) mengemukakan bahwa sosialisasi adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

- d. Fungsi Instansi – Instansi Terkait Dalam Evaluasi Pembangunan Perkotaan

Dalam evaluasi pembangunan perkotaan tidak hanya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis saja yang menjadi nahkoda pembangunan daerah, tetapi ada beberapa instansi lain yang dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka dibentuk Kelompok Kerja

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ciamis yang berperan dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan, salah satunya dalam Program Kotaku.

Terdapat tugas, fungsi, dan uraian tugas instansi – instansi terkait dalam evaluasi pembangunan perkotaan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 600/Kpts.241-Huk/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

- 1) Memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran, kepedulian dan dukungan seluruh stakeholder di tingkat Kabupaten dalam proses percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Meningkatkan kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian dan komitmen dukungan riil seluruh stakeholder dalam proses implementasi program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- 3) Menyusun dokumen Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ciamis.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Ciamis, stakeholder lainnya ditingkat kabupaten, serta Satuan Kerja Provinsi dan Pusat dalam menyusun Rencana dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam proses implementasi Percepatan

Pembangunan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

2. Koordinasi
3. Advokasi
4. Advisori

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2014:3).

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Lamanya penelitian 9 bulan terhitung dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019. Lokasi peneliti adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. Peneliti memutuskan untuk menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N Dunn (2000:610) mengenai 6 tipe kriteria evaluasi yang dijadikan dimensi penelitian yaitu sebagai berikut :

1) Efektifitas, dengan indikator yaitu :

- a. Dari segi kualitas, diantaranya :
 - Konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
 - Peranan program Kotaku dalam rangka pengurangan kawasan kumuh

- Tercapainya akses terhadap infrastruktur yang merupakan tujuan program Kotaku

b. Dari segi kuantitas, diantaranya :

- Terdapat target kerja yang jelas dan sudah ditetapkan
- Hasil pekerjaan sesuai dengan target

c. Dari segi durasi penyelesaian pekerjaan, diantaranya :

- Waktu yang tersedia mencukupi untuk pencapaian target kerja
- Terdapat kejelasan waktu penyelesaian pekerjaan

2) Efisiensi, dengan indikator yaitu :

a. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami keterlambatan

b. Biaya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi teknis maupun administrasi

c. Terdapat tenaga/peranan instansi terkait yang bekerja sesuai dengan tupoksinya

3) Kecukupan, dengan indikator yaitu :

a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh program Kotaku sesuai dengan permasalahan yang dimiliki oleh kawasan kumuh tersebut

b. Kebijakan yang dilaksanakan tidak menimbulkan permasalahan antara biaya dengan efektifitas

4. Perataan, dengan indikator yaitu :

a. Kegiatan program Kotaku merupakan prioritas dan hasilnya dirasakan oleh semua masyarakat.

- b. Terciptanya suatu keadilan bagi sasaran kebijakan dari hasil kebijakan
5. Responsivitas, dengan indikator yaitu :
 - a. Adanya tanggapan yang baik dari masyarakat dari hasil program Kotaku
 - b. Peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan bangunan fisik yang sudah terbangun
6. Ketepatan, dengan indikator yaitu :
 - a. Ketepatan pengalokasian yang disebut dengan kawasan kumuh
 - b. Ketepatan sasaran kegiatan baik yang dilaksanakan oleh program Kotaku maupun dinas teknis sudah bersinergi dalam memecahkan permasalahan di kawasan kumuh
 - c. Ketepatan waktu kegiatan
 - d. Ketepatan penggunaan anggaran
 - e. Ketepatan dalam menentukan pilihan prioritas kegiatan
- 4) Data dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Menurut Bungin sumber data dibagi 2, yaitu :
 - 1 Sumber data primer adalah:
 - a. Kepala dinas melalui Kepala Bidang 1 orang.
 - b. Pegawai yang bekerja pada bidang perumahan dan permukiman sebanyak 1 orang
 - c. Tim Kotaku dan masyarakat sebanyak 5 orang
 - d. Dengan demikian banyaknya informan yang akan diwawancarai sebanyak 7 orang.
 - 2 Sumber data sekunder adalah:
 - a. Sumber data yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis berupa dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan kegiatan.
 - b. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan program, media cetak yang juga berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
- 5) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a) Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan literatur atau sumber-sumber bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.
 - b) Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, melalui kegiatan:
 - a. Observasi
 - b. WawancaraSugiyono (2011:247) menyatakan bahwa "kegiatan analisis data kualitatif dilakukan meliputi tiga tahap, diantaranya Reduksi data (Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Conclusion Drawing/Verification". Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:
 1. Reduksi Data (Reduction)
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

2. Penyajian Data (Data Display)
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Conclusion Drawing/Verification
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan melakukan pembahasan mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. Pada umumnya Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal karena masih ditemukan adanya berbagai hambatan.

Kemudian penulis dapat menjelaskan mengenai hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dengan mengacu kepada dimensi sebagai berikut :

1. Efektivitas

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan jika dilihat dari dimensi efektivitas bahwa Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kabupaten Ciamis belum optimal. Dilihat dari pelaksanaannya meskipun pada umumnya pelaksanaan program kota tanpa kumuh ini sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan dalam mengukur skala prioritas tidak dilaksanakan secara sistematis dari apa yang direncanakan sebelumnya.

Pemaparan dari dimensi diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nawawi (2003:52) menyatakan bahwa Pelaksanaan atau penggerakan dilakukan organisasi setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk.

Berdasarkan penjelasan diatas yang dikaitkan dengan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa Efektivitas merupakan suatu tindakan mengenai terjadinya suatu efek dan akibat yang diharapkan dalam mencapai tujuan pengelola program Kota Tanpa Kumuh.

Dengan demikian Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis mengenai efektivitas program untuk mengurangi kawasan kumuh sudah dilakukan, namun belum berjalan dengan optimal.

2. Efisiensi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan jika dilihat dari dimensi efisiensi program Kota Tanpa Kumuh sudah dilakukan, namun belum maksimal dan optimalnya hal tersebut dikarenakan menemukan kendala yaitu kurangnya pengawasan dari pihak instansi dan pihak terkait dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat.

Pemaparan pada dimensi diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh William H (Soewarno, 1980 : 21) menyatakan bahwa Pengawasan (Controlling) dimaksudkan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sedapat mungkin sesuai dengan rencana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program kotaku jika dilihat dari dimensi efisiensi masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi dan pihak terkait.

Dengan demikian Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis mengenai efisiensi untuk mengurangi kawasan kumuh sudah dilakukan, namun belum berjalan dengan optimal.

3. Kecukupan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam evaluasi program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis jika dilihat dari dimensi Kecukupan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis sudah dijalankan dengan baik, sesuai dengan resiko perencanaan anggaran.

Sama halnya dengan pendapat penulis berdasakan hasil observasi dilapangan penulis berpendapat bahwa Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis bila dilihat dari dimensi Kecukupan telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terlihat dari rutin melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran

masyarakat dan mengenal 7 indikator kumuh dalam program kota tanpa kumuh.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh oleh MacBride (Effendy, 2003:27) mengemukakan bahwa sosialisasi adalah penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.

Dengan demikian Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis untuk mengurangi kawasan kumuh sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Perataan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Dalam dimensi perataan mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dapat dilihat dari kegiatan kotaku merupakan prioritas untuk mengurangi kawasan kumuh dan terciptanya suatu keadilan bagi sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis berpendapat bahwa pelaksanaan Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis bila dilihat dari dimensi perataan program Kota Tanpa Kumuh untuk mengurangi kawasan kumuh telah dilaksanakan dengan hasil kinerja yang baik karena masyarakat sudah menerima dan merasakan manfaat atau dampak dari infrastruktur yang penting untuk perekonomian masyarakat.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sedarmayanti, (2011:260) menyatakan

bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan yang telah ditentukan).

Dengan demikian Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis untuk mengurangi kawasan kumuh sudah dilakukan dan mendapat respon yang positif dari masyarakat.

5. Responsivitas

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Dalam dimensi responsivitas mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis bisa dilihat dari adanya tanggapan dari masyarakat dan peran serta masyarakat di dalam program.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis berpendapat bahwa pelaksanaan Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis bila dilihat dari dimensi responsivitas program untuk mengurangi kawasan kumuh yang dilaksanakan sudah baik dilihat dari peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan bangunan fisik yang sudah terbangun, mengusulkan kebutuhan kegiatan dan ikut berpartisipasi dalam swadaya.

Pemaparan pada dimensi diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mubyarto (Huraerah, 2008:96) menyatakan bahwa Partisipasi adalah

keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis mengenai responsivitas program untuk mengurangi kawasan kumuh sudah dilakukan dengan optimal dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat.

6. Ketepatan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Dalam dimensi Ketepatan mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis sudah dilakukan oleh pengelola program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis sudah dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis berpendapat bahwa pelaksanaan Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis bila dilihat dari dimensi ketepatan program untuk mengurangi kawasan kumuh telah dilaksanakan sudah baik dan dapat dilihat dari Ketepatan pengalokasian, ketepatan waktu, ketepatan anggaran, ketepatan menentukan pilihan prioritas kegiatan serta sinergitas dengan dinas yang lain sudah menunjukkan keberhasilan suatu program berjalan dengan baik dan sudah menunjukkan pengawasan dengan baik

terbukti dengan sesuai schedule, sesuai sasaran kawasan kumuh serta prioritas utama kawasan kumuh yang tercantum dalam SK Bupati.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian dilihat dari pengertian di atas pengelola program Kota Tanpa Kumuh memang sudah melakukan tugasnya dengan baik, Dengan demikian Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis mengenai ketepatan program untuk mengurangi kawasan kumuh sudah dilakukan dengan optimal dan sesuai yang diharapkan.

b. Hambatan dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari adanya hambatan yang dihadapi oleh Pengelola program Kota Tanpa Kumuh tersebut, Kemudian hambatan-hambatan yang dimaksud dapat diuraikan berdasarkan dimensi sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat hambatan yang terjadi dalam evaluasi program kota tanpa kumuh di Kabupaten Ciamis. Hambatan dimensi efektivitas yang

dihadapi diantaranya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh karena kurangnya partisipasi sebagai pihak untuk dapat aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh dikarenakan belum memahami persoalan kekumuhan dan belum memenuhinya 7 indikator kumuh.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa memang hambatan dalam efektivitas mengenai evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis telah dilakukan, namun terdapat hambatan yang dilalui yaitu belum terpenuhinya 7 indikator kumuh.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2002: 184) mengemukakan bahwa Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Dengan demikian bahwa hambatan yang dialami pada dimensi Efektivitas yang menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program Kota Tanpa Kumuh telah dilakukan, namun belum optimal pelaksanaannya.

2. Efisiensi

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat hambatan yang terjadi dalam evaluasi program kota tanpa kumuh di Kabupaten Ciamis. Hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis jika dilihat dari dimensi efisiensi yaitu dalam menjalankan kegiatan harus disesuaikan dengan intruksi tim fasilitator

selain itu kurangnya pengawasan dalam program Kota Tanpa Kumuh oleh instansi dan pihak yang seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2002: 185) mengemukakan bahwa Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Dengan demikian bahwa hambatan yang dialami pada dimensi Efisiensi yang menyatakan bahwa untuk mengukur efisiensi program untuk mengurangi kawasan kumuh telah dilakukan, namun belum optimal. Karena hambatannya masih terdapat kegiatan yang harus disesuaikan dengan intruksi tim fasilitator dan masih kurangnya pengawasan oleh instansi dan pihak terkait.

3. Kecukupan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat Hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis jika dilihat dari dimensi kecukupan yaitu ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada dan kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh ini, namun hal tersebut dapat teratasi dengan baik.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2002: 186) mengemukakan bahwa Kecukupan dalam kebijakan publik

dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu 18 tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dengan demikian bahwa hambatan yang dialami pada dimensi Kecukupan program yang menyatakan bahwa untuk mengukur Kecukupan program dalam mengurangi kawasan kumuh telah dilakukan dengan baik dan hasilnya efektif dan efisien.

4. Perataan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa tidak ada hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis karena masyarakat sebagai penerima bantuan sudah merasakan dampaknya secara langsung selain itu masyarakat sudah merasakan dampak positif dari adanya program Kota Tanpa Kumuh ini.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2002: 187) mengemukakan bahwa Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil

didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Dengan demikian berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan yang dialami pada dimensi perataan untuk mengurangi kawasan kumuh telah dilaksanakan dan dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya masyarakat memberikan respon yang positif akan program Kota Tanpa Kumuh tersebut.

5. Responsivitas

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa bahwa tidak ada hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis karena masyarakat sebagai penerima bantuan memberikan tanggapan yang baik dari hasil program Kota Tanpa Kumuh dan semua masyarakat telah menerima manfaatnya dan program dilaksanakan dengan maksimal.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dunn (2003:437) mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami pada dimensi responsivitas yang menyatakan bahwa untuk mengurangi kawasan kumuh telah dilaksanakan dan dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya masyarakat puas dengan adanya program ini.

6. Ketepatan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam ketepatan

program tentu tidak lepas dari adanya hambatan yang harus dilalui, namun dalam ketepatan program kota tanpa kumuh ini membuktikan bahwa hambatan yang dihadapi bisa dilalui dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi bahwa tidak ada hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis karena karena sudah memenuhi syarat sesuai dengan pedoman program Kota Tanpa Kumuh.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2002: 184) mengemukakan bahwa ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami pada dimensi ketepatan yang menyatakan bahwa untuk mengurangi kawasan kumuh telah dilaksanakan dan dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan pedoman program Kota Tanpa Kumuh.

c. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis telah dilakukan beberapa upaya. Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan berdasarkan pada beberapa dimensi yang memerlukan upaya guna mengatasi hambatan. Yang diuraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam dimensi upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam dimensi efektivitas mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis ialah dengan mengevaluasi kembali sampai sejauh mana 7 indikator kumuh tersebut dilaksanakan dan mengevaluasi sampai sejauh mana pekerjaan dilaksanakan dan Melakukan sosialisasi terhadap semua pihak khususnya desa atau kelurahan mengenai program kotaku.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Nugroho, (2014 : 706) menyatakan bahwa evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai”, yaitu (1) pengertian waktu (mencapai/melewati “target waktu”) dan (2) pengertian kerja (“pekerjaan tuntas”).

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi yang menyatakan bahwa untuk menentukan upaya dalam mengukur efektivitas program Kota Tanpa Kumuh dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengevaluasi kembali sampai sejauh mana 7 indikator kumuh tersebut dilaksanakan.

- b. Melakukan sosialisasi terhadap semua pihak khususnya desa atau kelurahan mengenai program kotaku..

Dengan demikian upaya mengukur efektivitas program Kota Tanpa Kumuh dalam mengurangi kawasan kumuh tersebut dilaksanakan dengan baik maka Dinas terkait harus berkolaborasi dengan pemerintah desa serta masyarakat guna membantu dalam mensukseskan program Kota Tanpa Kumuh ini.

2. Efisiensi

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam dimensi efisiensi mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis ialah memantau dan memonitoring program Kota Tanpa Kumuh dengan memantau sampai sejauh mana efisiensi pekerjaan dilaksanakan. Memang dalam mengukur efisiensi program Kota Tanpa Kumuh telah dilakukan namun belum berjalan dengan efektif sesuai dengan kebijakan bisa dengan Melakukan sosialisasi, koordinasi dalam rapat-rapat yang dilaksanakan.

Hal tersebut sejalan menurut Nugroho, (2014 : 43) menyatakan bahwa Kebijakan publik, di sisi lain, adalah produk yang memperjuangkan kepentingan publik, yang filosofinya adalah mensyaratkan pelibatan publik sejak awal hingga akhir

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi yang menyatakan bahwa untuk menentukan upaya dalam mengukur efisiensi program Kota Tanpa Kumuh dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi, koordinasi dalam rapat-rapat dengan pihak terkait.

- b. Adanya sinergitas antara instansi terkait dalam melakukan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi yang baik.

Dengan demikian upaya mengukur efisiensi program Kota Tanpa Kumuh dalam mengurangi kawasan kumuh tersebut dilaksanakan dengan baik maka Dinas terkait harus berkolaborasi dengan pemerintah desa serta masyarakat guna membantu dalam menyukseskan program Kota Tanpa Kumuh ini.

3. Kecukupan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam dimensi Kecukupan mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis ialah kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana dan melakukan survey sebelum melaksanakan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan dukungan dari semua pihak maka upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya program berjalan dengan efektif.

Hal tersebut sejalan menurut Mulyadi (2015:8) menyatakan bahwa Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan upaya dalam mengukur kecukupan program Kota Tanpa Kumuh dapat dilakukan dengan cara:

- a. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana.

- b. Melakukan survey ke wilayah kumuh yang telah disepakati sebelum melaksanakan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dengan demikian upaya mengatasi hambatan dalam mengukur kecukupan program Kota Tanpa Kumuh sudah dilaksanakan dengan baik dan hasilnya efektif dan efisien.

4. Perataan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam dimensi perataan mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis ialah dengan Menginformasikan dampak serta manfaat yang didapatkan program kota tanpa kumuh secara terbuka pada masyarakat dan memberikan pengertian kepada pengurus lingkungan RT atau RW agar menjelaskan kepada masyarakat dan Pemangku kebijakan harusnya tidak semua di SK kan oleh Bupati namun harus berdasarkan Base Line. Dengan dukungan dari semua pihak terkait maka upaya untuk mengatasi hambatan dimensi perataan yang terjadi dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya program berjalan dengan optimal.

Hal tersebut sejalan menurut JE. Hosio (2007:57) menyatakan bahwa dampak adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan upaya dalam mengukur perataan program Kota Tanpa Kumuh dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menginformasikan dampak dan manfaat yang didapatkan program kota tanpa kumuh secara terbuka pada masyarakat.
 - b. Memberikan pengertian kepada pengurus lingkungan rt atau rw agar menjelaskan kepada masyarakat dan Pemangku kebijakan harusnya tidak semua di SK kan oleh Bupati namun harus berdasarkan Base Line.
- kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa menentukan upaya dalam mengukur responsivitas program Kota Tanpa Kumuh dapat dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kapasitas peran dari pihak yang terkait agar program dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- b. Melakukan pendampingan kepada masyarakat agar mengetahui tentang program kotaku.

Dengan demikian upaya di dalam mengatasi hambatan yang dihadapi untuk mengukur responsivitas program Kota Tanpa Kumuh dalam mengurangi kawasan kumuh tersebut telah dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya masyarakat puas dengan adanya program ini.

6. Ketepatan

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam dimensi Ketepatan mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis ialah menentukan pilihan prioritas kegiatan yaitu harus adanya kesepakatan dari semua pihak yang ada di kawasan kumuh. dan melakukan koordinasi dengan melakukan review perencanaan yang efektif dalam pengalokasian program anggaran sehingga sasaran program tercapai.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam mengukur ketepatan program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dengan

Dengan demikian upaya di dalam mengatasi hambatan yang untuk mengukur perataan program Kota Tanpa Kumuh dalam mengurangi kawasan kumuh tersebut telah dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya kebijakan program ini berdampak adil dan masyarakat memberikan respon yang positif akan program Kota Tanpa Kumuh tersebut.

5. Responsivitas

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam dimensi responsivitas mengenai Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis ialah meningkatkan kapasitas peran dari pihak yang terkait agar program dapat dilaksanakan dengan maksimal dan melakukan pendampingan kepada masyarakat agar mengetahui tentang program kotaku. Dengan dukungan dari semua pihak terkait maka upaya untuk mengatasi hambatan dimensi perataan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya program berjalan dengan efektif.

Hal tersebut sejalan menurut Soerjono Soekanto, (2002:243) menyatakan bahwa Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

memantau sampai sejauh mana pekerjaan dilaksanakan. Memang dalam mengukur evaluasi program dilihat dari dimensi ketepatan Kota Tanpa Kumuh telah dilakukan namun belum berjalan dengan efektif.

Hal tersebut sejalan menurut Hasibuan, (2009:85) menyatakan bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan upaya dalam mengukur ketepatan program Kota Tanpa Kumuh dapat dilakukan dengan cara:

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik. Karena dari semua indikator yang ada belum semua dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh William N Dunn (2000:610) mengenai Enam kriteria evaluasi.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diketahui adanya hambatan-hambatan dari beberapa indikator dalam Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Efektivitas

- a. Menentukan pilihan prioritas kegiatan yaitu harus adanya kesepakatan dari semua pihak yang ada di kawasan kumuh.
- b. Melakukan koordinasi dengan melakukan review perencanaan yang efektif dalam pengalokasian program anggaran sehingga sasaran program tercapai.

Dengan demikian upaya di dalam mengatasi hambatan yang dihadapi untuk mengukur ketepatan program Kota Tanpa Kumuh dalam mengurangi kawasan kumuh tersebut telah dilaksanakan dengan baik sehingga hasilnya masyarakat puas dengan adanya program ini.

Hambatannya dalam Efektivitas yaitu konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program Kota Tanpa Kumuh karena kurangnya partisipasi sebagai pihak untuk dapat aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh.

2. Dimensi Efisiensi
Hambatannya dalam efisiensi yaitu menjalankan kegiatan harus disesuaikan dengan intruksi tim fasilitator selain itu kurangnya pengawasan dalam program Kota Tanpa Kumuh oleh instansi dan pihak yang seharusnya bekerja sesuai dengan tupoksinya.
3. Dimensi Kecukupan
Hambatannya ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada dan kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam program Kota Tanpa Kumuh ini.

4. Dimensi Perataan
Hambatannya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam program ini untuk mengurangi wilayah kawasan kumuh.
 5. Dimensi Responsivitas
Hambatan yang dihadapi dalam peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan bangunan fisik yang sudah terbangun yaitu belum semua masyarakat mengerti pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan dan pembuatan RPLP.
 6. Dimensi Ketepatan
Hambatan yang dihadapi dalam ketepatan pengalokasian yang disebut dengan kawasan kumuh yaitu target kerja yang jelas dan sudah ditetapkan berdasarkan Pedoman Program Kota Tanpa Kumuh yaitu warga kurang setuju dengan usulan yang sudah ada.
- sosialisasi terhadap semua pihak khususnya desa atau kelurahan mengenai program kotaku.
2. Dimensi Efisiensi
 - a. Upaya yang dilakukan dengan sosialisasi, koordinasi dalam rapat-rapat dengan pihak terkait.
 - b. Upaya yang dilakukan dengan adanya sinergitas antara instansi terkait dalam melakukan.
 - c. koordinasi, konsolidasi dan komunikasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : UGM Press
- Effendi, Onong, Uchjana. 2003. Ilmu, Teori dan Komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hadari, Nawawi. 2003. Metode Penelitian Sosial. Gajah Mada Yogyakarta : Universitas Press
- Hasibuan, Melayu. S.P. 2009. Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta :PT.Bumi Aksara
- Hosio, JE. 2007. Kebijakan Publik dan Desentralisasi. Yogyakarta : Laksbang
- Mulyadi. 2007. Sitem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat
- Nugroho D, Riant. 2014. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT.Gramedia
- Sedarmayanti. 2011. Tata Kerja & Produktifitas Kerja. Bandung : CV.Mandar Maju
- Soekanto. 2002. Sosiologi untuk pengantar. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif
- Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diketahui adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Evaluasi Program Kota Tanpa oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis yang belum teratasi dengan baik adalah sebagai berikut:
1. Dimensi Efektivitas
 - a. Upaya yang dilakukan dengan mengevaluasi kembali sampai sejauh mana 7 indikator kumuh tersebut dilaksanakan.
 - b. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan

- Kuntitatif R&D. Bandung : Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
PT.Alfabeta tentang RPJMN Tahun 2015-2019
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Teori & Proses. Yogyakarta : Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun
PT.Media Presindo 2016 tentang Peningkatan Kualitas
Perumahan dan Permukiman Kumuh
SK Mendagri No. 65 tahun 1995 Tentang
Manajemen Perkotaan
- Sumber Dokumen :**
- Keputusan Bupati Ciamis Nomor : UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang
600/Kpts.241-Huk/2017 tanggal 3 Perumahan dan Kawasan
April 2017 tentang Pembentukan Permukiman.
Kelompok Kerja Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Ciamis